

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dimensi Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azyumardi Azra. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chatrina Darul Rosikah dan Desy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan AntiKorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisem Pemberhentiannya Menurut Sistem pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H. A. W. Widjaja. 1998. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

_____. 2013. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan, Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Prsada.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Saldi Isra. 2013. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suharizal. 2011. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Malang: Setara Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. SKRIPSI, JURNAL

Daniel Marhaen Paransi. 2017. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pilkada Serentak*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.3/Mei/2017.

Fathul Rahman Kurniawan. 2017. *Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanuddin.

Gugum Ridho Putra 2012, *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Depok; Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. WEBSITE

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>,

<http://www.ditpolairpoldasulbar.com/2017/03/27/3tiga-tindak-pidana-ekstra-ordinary-crime/>,

<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/05/20160521/aturan.mantan.narapidana.maju.di.pilkada.dinilai.tak.batasi.hak.untuk.dipilih>,

<https://nasional.kompas.com/read/2016/02/18/15595061/Ini.10.Hal.yang.Membuat.Koruptor.Tidak.Pernah.Jera.>,

<https://nasional.tempo.co/read/689110/ini-9-bekas-napi-yang-kini-jadi-calon-kepala-daerah>,

<https://www.youtube.com/watch?v=5itZAe4om3M>, Liputan CNN.

<https://www.youtube.com/watch?v=GP8YmmuuJRY>, Kanal Pengetahuan FH UGM.